
**PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN
PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN
ANGGARAN PADA PEMERINTAH**

Bahagia Darmini¹

¹*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*

Email: bahagiadarmini@student.uir.ac.id

Efi Susanti²

²*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*

Email: efisusanti@eco.uir.ac.id

Abstrak

Penyerapan anggaran yang belum optimal di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD Dinas di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini didasarkan pada Teori Manajemen Keuangan Publik dan Teori Good Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian mencakup 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan sampel 17 SKPD Dinas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 87 pejabat pengelola keuangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dengan nilai signifikansi 0,540. Sebaliknya, SPIP berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran dengan nilai signifikansi 0,002, serta menjadi variabel yang paling dominan. Perubahan Anggaran juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,042. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi SPIP serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan perubahan anggaran guna mendorong optimalisasi penyerapan anggaran daerah.

Kata Kunci: Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Perubahan Anggaran, Penyerapan Anggaran.

Abstract

Budget absorption that was not yet optimal in Rokan Hilir Regency indicated that problems still existed in regional financial management, particularly at the level of Regional Work Units (SKPD). This study aimed to analyze the effects of Regional Financial Regulations, the Government Internal Control System (SPIP), and Budget Changes on Budget Absorption in SKPD offices within the Government of Rokan Hilir Regency. This study was based on Public Financial Management Theory and Good Governance Theory. This study used a quantitative approach with an associative research design. The research population consisted of 44 Regional Government Organizations (OPD), with a sample of 17 SKPD offices selected using purposive sampling. The number of respondents was 87 financial management officials. Data were collected through Likert-scale questionnaires and were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 27. The results showed that Regional Financial Regulations did not have a significant effect on Budget Absorption, with a significance value of 0.540. In contrast, SPIP had a significant effect on Budget Absorption, with a

significance value of 0.002, and became the most dominant variable. Budget Changes also had a significant effect, with a significance value of 0.042. This study recommended strengthening the implementation of SPIP and improving the quality of planning and management of budget changes to optimize regional budget absorption.

Keywords: *Regional Financial Regulations, Government Internal Control System, Budget Changes, Budget Absorption*

PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan daerah. Anggaran yang terserap secara optimal memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sehingga tujuan pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai. Sebaliknya, rendahnya penyerapan anggaran dapat mengindikasikan ketidakefisienan dalam perencanaan atau pelaksanaan program, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Anggraini et al, 2024). Berdasarkan pandangan Kementerian Keuangan, pengeluaran pemerintah yang produktif dan berorientasi pada kebutuhan publik memiliki potensi besar dalam mendorong aktivitas ekonomi (Kemenkeu, 2022). Efektivitas penyerapan anggaran menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk program-program yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Anggaran, 2022). efektif mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab (Verahastuti, 2022) untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tingkat optimal penyerapan anggaran mencerminkan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintah daerah. Sejumlah aspek yang berperan dalam memengaruhi tingkat serapan anggaran antara lain mencakup kebijakan regulasi keuangan daerah, implementasi sistem pengendalian internal, serta dinamika dalam perubahan alokasi anggaran.

Aspek pertama adalah *Regulasi keuangan daerah* berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa proses penganggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Setiawan, 2022)

Aspek kedua yaitu *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)* berfungsi sebagai suatu sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan dalam penyajian laporan keuangan. Implementasi SPIP yang berjalan dengan baik dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Sopian et al., 2024).

Aspek ketiga yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu Perubahan anggaran merupakan penyesuaian terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan, yang dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan prioritas program atau kondisi ekonomi yang tidak terduga. Perubahan anggaran yang dilakukan secara tepat dan terencana dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pelaksanaan program dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien (Putri et al, 2024).

Penelitian lain yang dilakukan Setiawan (2022) juga menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Perubahan anggaran

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab utama dari permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, penting untuk menganalisis secara sistematis bagaimana regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan perubahan anggaran memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Keempat faktor ini dinilai memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan belanja daerah. Jika faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk memperbaiki sistem dan strategi pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Telaah Literatur

Teori Manajemen Keuangan Publik (*Public Financial Management Theory*)

Menurut Frank (2006) dalam bukunya "*Public Financial Management*" juga menekankan pentingnya orientasi hasil (*results-oriented management*) dalam pengelolaan keuangan publik. Praktik-praktik terbaik (*best practice*) seperti perencanaan berbasis kinerja, pengukuran hasil, serta akuntabilitas kinerja menjadi kunci utama suksesnya pengelolaan anggaran negara dan daerah. Manajemen Keuangan Publik adalah fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Hepworth, 2024). Manajemen Keuangan Publik tidak hanya berorientasi pada pengendalian keuangan secara administratif, tetapi menekankan sistem manajemen terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan, demi memastikan setiap penggunaan dana publik memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Kristensen et al., 2019).

Teori *Good Governance*

Good governance dapat dipahami sebagai konsep yang berakar pada nilai-nilai universal, dan terdiri atas enam prinsip utama, yaitu *properness, transparency, participation, effectiveness, accountability*, dan *human rights*. Prinsip-prinsip ini membentuk inti substantif dari *good governance*, meskipun istilah dan penekanan formal bisa bervariasi antar negara. Berkaitan dengan itu, Addink (2019) menyatakan: "*Good governance has risen as a third dominant concept in the modern state. Alongside the rule of law and democracy, good governance is becoming increasingly important for the legitimacy of state authorities...*". *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan seperangkat prinsip dan praktik yang menjadi landasan utama bagi negara modern dalam menjamin legitimasi, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Addink, 2019).

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran didefinisikan sebagai pencairan dana atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada suatu periode tertentu (Danuputri, 2024). Penyerapan anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Rahmawati, 2020). Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta keberhasilan dalam mencapai target pembangunan yang telah direncanakan.

Regulasi Keuangan Daerah

Regulasi keuangan daerah merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi jalannya siklus keuangan di tingkat daerah, sehingga setiap langkah pengendalian yang dilakukan tercakup dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan (Setiawan, 2022). Hal ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahman, 2022). Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

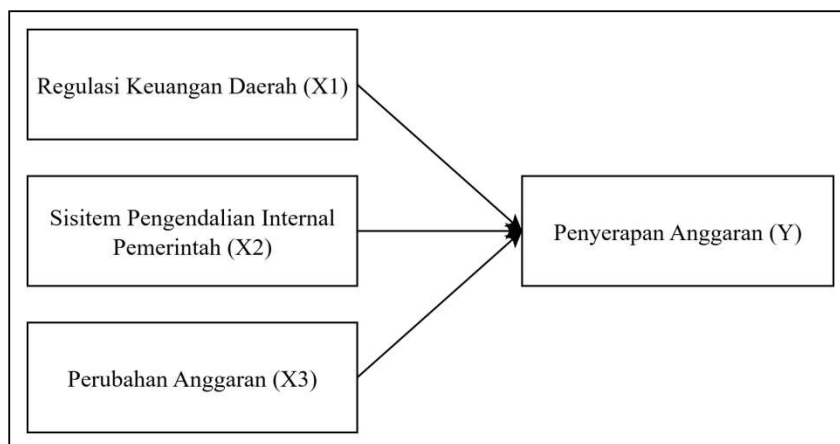
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu mekanisme pengawasan internal yang diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 (PP No 60, 2008). Tujuan utama dari SPIP adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firmansyah, 2020). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan” (PP No 60, 2008).

Perubahan Anggaran

Perubahan anggaran merupakan langkah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menyalurkan perencanaan keuangannya dengan kondisi atau dinamika yang berkembang selama pelaksanaan anggaran (Setiawan, 2022). Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan antara rencana dan realisasi anggaran akibat dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Perubahan anggaran dapat melibatkan penyesuaian pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD atau pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar unit kerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, keadaan darurat, atau keadaan luar biasa yang memerlukan penyesuaian anggaran (Permendagri, 2006).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Regulasi Keuanan Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran

Regulasi keuangan daerah adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur siklus keuangan pada tingkat daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan. Regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance, yaitu tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Setiawan, 2022; PP No. 12/2019). Kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah meminimalkan risiko penyimpangan, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Regulasi yang jelas membantu pengguna anggaran memahami peran dan tanggung jawab, serta mendorong kepatuhan dalam setiap tahapan pengelolaan. Studi Kuntadi (2022) dan Setiawan (2022) menunjukkan regulasi yang kuat dan dipatuhi berdampak signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Semakin baik pemahaman dan implementasi regulasi keuangan daerah, semakin optimal tingkat penyerapan anggaran. Regulasi yang tidak konsisten, ambigu, atau kurang dipahami cenderung menghambat realisasi anggaran akibat ketidakpastian administratif dan risiko penalti hukum.

H1 : Regulasi kuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penyerapan Anggaran

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah mekanisme pengawasan internal yang wajib diterapkan di setiap entitas pemerintah (PP No. 60/2008). SPIP yang efektif berperan besar dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, dan meningkatkan keandalan laporan keuangan (Firmansyah, 2020). Dengan adanya SPIP yang kuat, proses realisasi anggaran menjadi lebih terkontrol dan tepat sasaran, sehingga hambatan dalam pelaksanaan anggaran dapat diminimalisasi. Penelitian Kennedy et al. (2020) dan Setiawan (2022) membuktikan bahwa penerapan SPIP berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ini terjadi karena SPIP meningkatkan disiplin administratif, memperbaiki mekanisme pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan risiko. Tingkat penyerapan anggaran akan meningkat jika SPIP dijalankan secara konsisten dan terintegrasi di seluruh lini organisasi.

Sebaliknya, kelemahan SPIP (misal, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman risiko, atau kurangnya pemantauan) akan menyebabkan inefisiensi dan rendahnya serapan anggaran.

H2 : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

Pengaruh Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Perubahan anggaran adalah penyesuaian terhadap alokasi anggaran yang dilakukan akibat dinamika atau perubahan kondisi selama tahun berjalan, misal akibat kebutuhan mendesak, perubahan prioritas, atau munculnya SiLPA (Setiawan, 2022). Perubahan anggaran yang terencana dan transparan dapat meningkatkan fleksibilitas serta responsivitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Jika dilakukan tepat waktu, perubahan anggaran memungkinkan pemerintah menyesuaikan strategi belanja agar tetap relevan dengan kondisi aktual dan menghindari sisa anggaran yang tidak terserap. Penelitian yang dilakukan Setiawan (2022) juga menunjukkan bahwa perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.

H3 : Perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini berfokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah Kota Bagan Siapiapi dengan 17 sampel SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria. Kriteria inklusi sebagai berikut :

1. Memiliki dokumen keuangan yang lengkap
2. Memiliki laporan realisasi anggaran
3. Menyusun dan melaporkan hasil Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4. Mencatat dan melaporkan adanya perubahan anggaran selama tahun berjalan

Dengan demikian, jumlah SKPD Dinas yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 17 SKPD Dinas. Responden dalam setiap SKPD Dinas dipilih dari pejabat struktural dan fungsional yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi:

1. Kepala SKPD
2. Kepala Subbagian Keuangan (Kasubbag Keuangan)
3. Kepala Bidang (Kabid) yang terkait dengan anggaran
4. Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
6. Bendahara

Berdasarkan kriteria tersebut, maka seluruh sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 responden dari 17 SKPD.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Kuantitatif Asosiatif* dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang disusun secara terstruktur dan diberikan kepada pejabat pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Kualitas Data (Uji Validitas, Uji Reabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heterokedasitas, Uji Multikolinearitas), Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji T. Penelitian ini menggunakan SPSS 27 untuk menganalisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Identitas Responden

Identitas responden yang terlibat dalam penelitian, dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik pejabat pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Penyajian identitas responden dilakukan sebagai dasar untuk memahami latar belakang responden yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena karakteristik responden memiliki keterkaitan dengan persepsi dan pengalaman mereka terhadap penerapan regulasi keuangan daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta proses perubahan dan penyerapan anggaran.

Jenis Kelamin

Table 1

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|-----------|-------------|
| Laki-Laki | 54 | 62,07% |
| Perempuan | 33 | 37,93% |
| Total | 87 | 100% |

Jabatan

Table 2

Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan

| Jabatan | Jumlah | Persentase |
|--|-----------|-------------|
| Kepala SKPD | 6 | 6,90% |
| KPL.Subbagian Keuangan (Kasubbag Keuangan) | 20 | 22,99% |
| Kepala Bidang (Kabid) Terkait anggaran | 15 | 17,24% |
| PPA | 10 | 11,49% |
| PPTK | 21 | 24,14% |
| Bendahara | 15 | 17,24% |
| Total | 87 | 100% |

Lama Bekerja

Table 3

Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja

| Lama Bekerja | Jumlah | Persentase |
|--------------|--------|------------|
| 1-5th | 15 | 17,24% |
| 6-15th | 37 | 42,53% |
| 16-25th | 32 | 36,78% |
| >25 | 3 | 3,45% |

| | | |
|--------------|-----------|-------------|
| Total | 87 | 100% |
|--------------|-----------|-------------|

Pendidikan Terakhir

Table 4
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|---------------------|-----------|-------------|
| S3 | 1 | 1,15% |
| S2 | 34 | 39,08% |
| S1 | 43 | 49,43% |
| D3 | 8 | 9,20% |
| SLTA | 1 | 1,15% |
| Total | 87 | 100% |

Satuan Kerja

Table 5
Jumlah Responden Berdasarkan Satuan Kerja

| Satuan Kerja | Jumlah | Persentase |
|--|-----------|-------------|
| D.PUPR | 6 | 6,90% |
| D.Perpustakaan dan Kerasipan | 4 | 4,60% |
| D.Koperasi dan UMKM | 4 | 4,60% |
| D.Sosial Rohil | 6 | 6,90% |
| D.Pendidikan Dan Kebudayaan | 6 | 6,90% |
| Sekretariat Daerah | 6 | 6,90% |
| D.PMK Kab.Rohil | 3 | 3,45% |
| D.Perkim | 6 | 6,90% |
| Disperindag Kab.Rohil | 2 | 2,30% |
| D.Ketahanan pangan dan pertanian | 5 | 5,75% |
| D.Perhubungan | 5 | 5,75% |
| BPKAD Kab.Rohil | 5 | 5,75% |
| DISDiK Capil | 6 | 6,90% |
| D.Kependudukan dan Percapilan sepil | 4 | 4,60% |
| DSPPD dan perlindungan masyarakat | 4 | 4,60% |
| D.Lingkungan Hidup | 6 | 6,90% |
| D.Pariwisata | 2 | 2,30% |
| D.Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab.Rohil | 4 | 4,60% |
| D.Perikanan | 3 | 3,45% |
| Total | 87 | 100% |

Sumber: *Data Olahan (2026)*

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mewakili serta mengukur variabel yang ingin diteliti. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai signifikansi Sig (2-tailed) lebih kecil dari nilai taraf signifikan 0,05.

Table 6
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | Taraf Signifikan | Sig (2tailed) | Keterangan |
|---|-------|------------------|---------------|------------|
| Regulasi Keuangan Daerah (X1) | RKD1 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | RKD2 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | RKD3 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | RKD4 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X2) | SPIP1 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | SPIP2 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | SPIP3 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | SPIP4 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | SPIP5 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | SPIP6 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| Perubahan Anggaran (X3) | PA1 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PA2 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PA3 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PA4 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| Penyerapan Anggaran (Y) | PNYA1 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PNYA2 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PNYA3 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PNYA4 | 0.05 | 0.002 | Valid |
| | PNYA5 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PNYA6 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PNYA7 | 0.05 | 0.000 | Valid |
| | PNYA8 | 0.05 | 0.000 | Valid |

Sumber: *Output SPSS 27 (2025)*

Hasil Uji Validitas, setiap item pernyataan dalam kuesioner telah diuji untuk memastikan bahwa item tersebut benar-benar mengukur indikator dan variabel yang dimaksud. Seluruh item menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa isi setiap item kuesioner telah sesuai dengan indikator dan definisi operasional variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana konsistensi internal setiap butir pernyataan dalam kuesioner. Uji ini bertujuan memastikan bahwa seluruh indikator dalam variabel penelitian mampu memberikan jawaban yang stabil dan konsisten ketika diberikan kepada responden yang memiliki karakteristik serupa.

Table 7
Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha Items | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------|------------------------|------------------|------------|
| X1 | 0.659 | 0.60 | Reliabel |
| X2 | 0.729 | 0.60 | Reliabel |
| X3 | 0.822 | 0.60 | Reliabel |
| Y | 0.644 | 0.60 | Reliabel |

Sumber: *Output SPSS 27 (2025)*

Uji reliabilitas diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari batas minimum reliabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,60. Variabel Regulasi Keuangan Daerah (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,659, variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2) sebesar 0,729, variabel Perubahan Anggaran (X3) sebesar 0,822, dan variabel Penyerapan Anggaran (Y) sebesar 0,644. Nilai Cronbach's Alpha yang seluruhnya melebihi 0,60 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai, sehingga seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Normalitas residual diuji menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, yang merupakan salah satu teknik pengujian normalitas yang sering digunakan dalam analisis statistik.

Table 8
Hasil Uji Normalitas

| | Data Residual |
|------------------------|---------------|
| N | 87 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.200 |

Sumber: *Output SPSS 27 (2025)*

Hasil uji normalitas menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa jumlah data residual yang diuji dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 data. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linier antara variabel independen dalam regresi. Model dinyatakan bebas dari Multikolonieritas apabila nilai *tolerance* >0,1 dan VIF < 10.

Table 9
Hasil Uji Multikolonieritas

| Variabel | Nilai Tolerance | Nilai VIF |
|---|-----------------|-----------|
| Regulasi Keuangan Daerah (X1) | 0.531 | 1.951 |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X2) | 0.537 | 1.863 |
| Perubahan Anggaran (X3) | 0.605 | 1.654 |

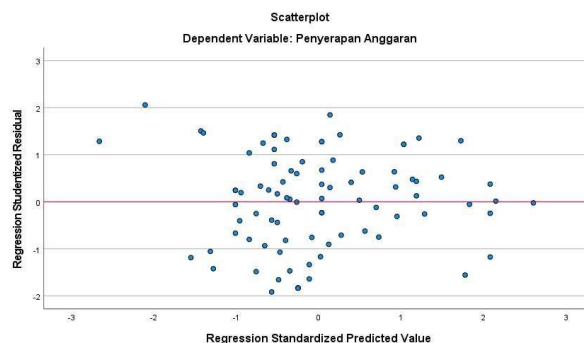
Sumber: *Output SPSS 27 (2025)*

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model regresi memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan varians residual antar pengamatan dalam suatu model regresi.

Table 10
Uji Heteroskedaritas



Sumber: *Output SPSS 27 (2025)*

Berdasarkan pola persebaran titik pada *scatterplot* tersebut, terlihat bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol tanpa menunjukkan bentuk pola tertentu seperti pengelompokan, penyempitan, atau pelebaran. Penyebaran yang tidak teratur ini menandakan bahwa varians residual berada dalam kondisi stabil.

Table 11
Hasil Uji Glejser

| Variabel | Sig. |
|---|-------|
| Regulasi Keuangan Daerah (X1) | 0.574 |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X2) | 0.744 |
| Perubahan Anggaran (X3) | 0.114 |

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa variabel *Regulasi Keuangan Daerah (X1)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,574, variabel *Sistem Pengendalian Internal*

Pemerintah/SPIP (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,744, dan variabel Perubahan Anggaran (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,114. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan model regresi dalam menerangkan perubahan yang terjadi pada variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai koefisien determinasi dinyatakan melalui Adjusted R Square, dengan rentang nilai antara 0 sampai 1.

Table 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0.600 ^a | 0.360 | 0.337 | 3.333 |

Sumber: *Ouput SPSS 27 (2025)*

Diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,600 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,337 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini secara simultan mampu menjelaskan sebesar 33,7% variasi Penyerapan Anggaran.

Uji Simultan (F)

Uji Simultan (F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang meliputi Regulasi Keuangan Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X2), dan Perubahan Anggaran (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Penyerapan Anggaran (Y).

Table 13
Uji Simultan (F)

| Model | Nilai F | Sig. |
|------------------|---------|-------|
| Regresi Residual | 15.581 | 0.000 |

Sumber: *Ouput SPSS 27 (2025)*

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa model regresi menghasilkan nilai F sebesar 15,581 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,000. Nilai signifikansi tersebut berada jauh di bawah batas yang sudah ditentukan yaitu 0,05, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara simultan.

Uji Parsial (t)

Uji Parsial (t) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu Penyerapan Anggaran (Y).

Table 14
Hasil Uji Parsial (t)

| Variabel | B | Sig |
|---|-------|-------|
| Konstanta | 3.546 | |
| Regulasi Keuangan Daerah (X1) | 0.167 | 0.540 |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X2) | 0.579 | 0.002 |
| Perubahan Anggaran (X3) | 0.540 | 0.042 |

Sumber: *Ouput SPSS 27 (2025)*

persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 3,546 + 0,167 X_1 + 0,579 X_2 + 0,540 X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Variabel Regulasi Keuangan Daerah (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,167 dengan nilai signifikansi 0,540. Karena nilai Sig. > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Regulasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.
- Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,579 dengan nilai signifikansi 0,002. Karena nilai Sig. < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.
- Variabel Perubahan Anggaran (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,540 dengan nilai signifikansi 0,042. Karena nilai Sig. < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Regulasi Keuangan Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,540, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05, meskipun koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,167, Sehingga H1 ditolak. Secara konseptual, regulasi keuangan daerah berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pengelolaan APBD agar berjalan tertib, taat asas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum secara langsung berdampak pada kinerja realisasi anggaran

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andriani & Biduri (2023) yang menyatakan bahwa regulasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran karena aturan yang ada relatif jelas dan telah menjadi standar baku, sehingga bukan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan anggaran. Penelitian Rahmawati & Ishak (2020) juga menemukan bahwa regulasi tidak memengaruhi penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota

Cimahi, yang disebabkan oleh keterlambatan petunjuk teknis, keterbatasan SOP operasional, serta sikap kehati-hatian SKPD dalam merealisasikan anggaran meskipun regulasi telah tersedia.

Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah/SPIP (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi positif sebesar 0,579. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPIP pada SKPD di Kabupaten Rokan Hilir, maka semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran yang dapat dicapai. Sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kota Tebing Tinggi karena mampu memperkuat kepatuhan prosedural dan mengurangi risiko administratif.

Analisis Pengaruh Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Perubahan Anggaran (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,042, yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi positif sebesar 0,540. Secara konseptual, perubahan anggaran merupakan instrumen fleksibilitas fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi aktual selama tahun berjalan melalui APBD Perubahan (APBD-P). Perubahan anggaran memungkinkan terjadinya pergeseran, penambahan, atau pengurangan pagu anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pramudya (2021) yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dapat berdampak positif terhadap penyerapan anggaran apabila didukung oleh kesiapan teknis dan kapasitas pelaksana anggaran. dapat disimpulkan bahwa Perubahan Anggaran merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Rokan Hilir, terutama ketika mekanisme perubahan anggaran mampu menjawab kebutuhan riil pelaksanaan program dan didukung oleh pengendalian internal yang efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Regulasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah belum menjadi faktor penentu dalam mendorong optimalisasi realisasi anggaran. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa

semakin efektif penerapan SPIP, semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran yang dapat dicapai, sehingga SPIP menjadi faktor yang paling dominan dalam penelitian ini. Perubahan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perubahan anggaran yang tepat dan terencana dapat mendukung peningkatan realisasi anggaran di SKPD.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum dikaji, seperti kualitas SDM, proses pengadaan barang dan jasa, sistem informasi keuangan, serta komitmen organisasi. Dengan model yang lebih luas, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran daerah. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan cakupan sampel yang lebih besar atau metode penelitian yang berbeda agar hasilnya semakin kuat dan bisa dibandingkan. Dengan begitu, penelitian di bidang pengelolaan keuangan daerah bisa terus berkembang dan memberi manfaat praktis bagi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, H. (2019). *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press.
- Aldina, I. (2018). Pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Almi M. Rambe, F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Andriani, R. N. H., & Biduri, S. (2023). Determination of regional budget management against budget absorption (Empirical study at the Public Works Office, East Java Province). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 2(1), 55–65.
- Anggita, M. S., & Budi, Y. A. B. (2023). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1339-1350.
- Anggraini, M. D., Sari, K. R., & Armaini, R. (2024). Factors Affect The Appetition Of The Budget In The Provincial Government On The Island Of Sumatra. *Balance: Journal of Accounting and Business*, 99(1), 111-120.
- Ardana, E. R., Husada, A. D. P., & Subakti, A. (2025). Analisis Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Belanja Modal Yang Dilakukan Pada Kota Surabaya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(8).
- Asniarti. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*
- Ayem, S., & Purwanto, T. (2024). Commitment of Budget Planning and SPIP Moderating Organizations to Budget Absorption. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 195–214. <https://doi.org/10.28932/jam.v16i2.9048>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir. (2025). Satuan kerja. <https://rohilkab.go.id/satuankerja>

- Direktorat Jenderal Anggaran. (2022). Strategi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga di akhir tahun 2022. Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/strategi-penyerapan-anggaran><https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/strategi-penyerapan-anggaran-kementerianlembaga-di-akhir-tahun-2022>
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, 121.
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(1), 1-15.
- Frank, H. A. (Ed.). (2006). *Public financial management*. Taylor & Francis.
- Hakim, Aziz. (2020). Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*. 2. <https://doi.org/10.22146/abis.v2i4.59338>
- Fitri, A., Hartati, S., & Wahyudi, R. (2022). Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 1(2). <https://ojs.politeknikprasetiyamandiri.ac.id/index.php/jakt/article/view/8>
- Hepworth, N. (2024). *Public Financial Management and Internal Control: The Importance of Managerial Capability for Successful Reform in Developing and Transition Economies*. Springer Nature.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Optimalisasi penyerapan anggaran untuk akhir tahun yang lebih baik. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita><https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2894-optimalisasi-penyerapan-anggaran-untuk-akhir-tahun-yang-lebih-baik.html><https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2894-optimalisasi-penyerapan-anggaran-untuk-akhir-tahun-yang-lebih-baik.html>
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108-117.
- Khoirunnisa, K. H. N. Y., & Siswanto, D. (2023). Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 157-180.
- Kristensen, J. K., Bowen, M., Long, C., Mustapha, S., & Zrinski, U. (Eds.). (2019). *PEFA, public financial management, and good governance*. World Bank Publications.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan,

- Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152.
- Mahmudi. (2007). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik*. UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mandasari, N. (2019). Pengaruh Regulasi Keuangan, SiLPA, dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Palembang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Mauli, A., & Rosmiati, M. (2020, September). Analisis penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah periode 2015-2019. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 866-872).
- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. (2024). Realisasi keuangan Pemkab Rohil capai 64,55%: Sekda percepat serapan anggaran dan selesaikan input DAK. Diakses dari <https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/realisasi-keuangan>[https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/realisasi-keuangan-pemkab-rohil-capai-64-55-sekda-percepat-serapan-anggaran-dan-selesaikan](https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/realisasi-keuangan-pemkab-rohil-capai-64-55-sekda-percepat-serapan-anggaran-dan-selesaikan-input-dakpemkab-rohil-capai-64-55-sekda-percepat-serapan-anggaran-dan-selesaikan)<https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/realisasi-keuangan-pemkab-rohil-capai-64-55-sekda-percepat-serapan-anggaran-dan-selesaikan-input-dakinput-dak>
- Peraturan Bupati. (2017). Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Paser: Pemerintah Kabupaten Paser.
- Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005).
- Prakoso, J. P. (2021). Penyerapan anggaran daerah rendah, bisa kena sanksi ambil alih. *Harian Jogja*.
<https://news.harianjogja.com/read/2021/07/22/500/1077801/penyerapan>[https://news.harianjogja.com/read/2021/07/22/500/1077801/penyerapan-anggaran-daerah-rendah-bisa-kena-sanksi-ambil-alih](https://news.harianjogja.com/read/2021/07/22/500/1077801/penyerapan-anggaran-daerah-rendah-bisa-kena-sanksi-ambil-alihanggaran-daerah-rendah-bisa-kena-sanksi-ambil-alih)
- Pramudya, Y. (2021). Analisis Serapan Anggaran Pada Instansi Badan Layanan Umum. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*: p-ISSN, 2723, 6609.
- Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 21(2), 244-261.
- Putri, A., Abdullah, S., Suparno, S., & Batara, G. (2024). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 186-199.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117-126.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180-189.
- Salma Febriana Danuputri, & Sri Nawatmi. (2024). Analisis Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*,

- 5(9), 4068 –. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.4214>
- Seputar Birokrasi. (2024). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Diakses pada 17 Mei 2025, dari <https://seputarbirokrasi.com/penerapan-sistem-pengendalian-internhttps://seputarbirokrasi.com/penerapan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-spip/pemerintah-spip/>
- Setiawan, H. (2022). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(3), 425-445.
- Simamora, B. (2022). Skala Likert, Bias Penggunaan dan Jalan Keluarnya. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 84–93. <https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978>
- Sopian, M. A., Kusuma, I. C., & Setiawan, A. B. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 39467–39478. Retrieved from <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19688>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, H., & Diana, H. (2023). Pengaruh Kualitas Sdm, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 2(2 AGUSTUS), 51-68.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2025). TRansparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Provinsi Riau. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 4(2 AGUSTUS), 200-211.
- Verahastuti, C., & EkaYudhyani, H. P. (2022). Perbandingan Penyerapan Anggaran Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 11(1), 300-310.
- Wawasan Riau. (2023). Ketua DPRD Rohil, Maston, sebut saat ini realisasi serapan APBD Rohil rendah. Diakses dari <https://wawasanriau.com/news/detail/8353/ketua-dprd-rohil-maston-sebuthttps://wawasanriau.com/news/detail/8353/ketua-dprd-rohil-maston-sebut-saat-ini-realisiserapan-apbd-rohil-rendahsaat-ini-realisiserapan-apbd-rohil-rendah>
- Wulandari, S., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan Rebudgeting sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 93-110.